

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASCA
PEMEKARAN DI DESA SU'RULANGI KECAMATAN
POLONGBANGKENGSELATAN KABUPATEN TAKALAR**

NIRWANA

Nomor Stambuk : 105640136811



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2015

HALAMAN PENGANTAR
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PASCA PEMEKARAN DI DESA SU'RULANGI KECAMATAN
POLONGBANGKENGSELATAN KABUPATEN TAKALAR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Diajukan Oleh

NIRWANA

Nomor Stanbuk : 105640135811

Kepada

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Proposal Penelitian : Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan
Infrastruktur Pasca Pemekaran di Desa
Su'rulangi Polongbengkeng Selatan
Kabupaten Takalar

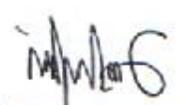
Nama Mahasiswa : NIRWANA
Nomor Stambuk : 10564 01368 11
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mappamiring, M.Si

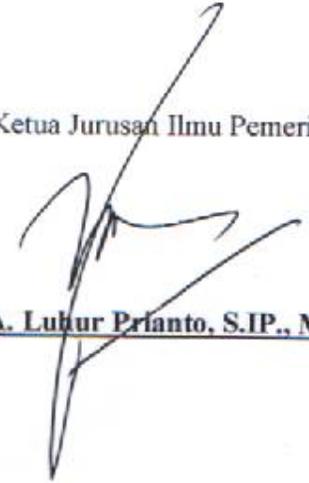

Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos., M.Si

Diketahui Oleh :

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si


A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1387/ FSP/A.1-VIII/X/36/2015 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam jurusan Ilmu Pemerintahan. Di Makassar Pada Hari Sabtu, 27 Oktober 2015.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si.

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (ketua)
2. Dr. Hj. Fatmawati, M. Si
3. Drs. Amir Muhiddin, M.Si
4. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si



ABSTRAK

Nirwana 2015. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. (Mappamiring Dan Ihyani)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyangan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan infrastruktur desa. Peneliti mengundang metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada di lapangan dengan tehnik pengumpulan data dai wawancara mendalam terhadap para informan.

Dari hasil penelitian didapati dalam pelaksanaan pembangunan , pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Keywords : Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur

KATA PENGANTAR



“ AssalamuAlaikumwarahmatullahiWabarakatuh “

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkengselatan Kabupaten Takalar” dapat di selsesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biayah serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari, Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M. Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang takternilai harganya. Teriring Doa semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amalkebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis taklupa mengucapkan Penghargaan dan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Dr.H. Irwan Akib, M.Pd, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.Ip, Selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
5. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
6. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun material. Saparuddin Nakku dan Nur Aeni.
7. Kepala Desa Su'rulangi, Kepala DPRD Kabupaten Takalar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Bapeda Kabupaten Takalar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu pemerintahan angkatan 2011

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Saparuddin Nakku dan Ibunda Nur aeni yang senantiasa memberikan nasehat, bimbingan, motivasi, dan doa agar penulis dapat menyelesaikan studrei dengan baik, dan taklupa pula jasa-jasanya dalam

melahirkan, membesarkan dan membina serta mendidik penulis. Semoga jerih payah Ayahanda dan Ibunda mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Allah SWT. A m i n.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, Juni 2015

Penulis

Nirwana

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrk	v
KataPengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan.....	7
B. Konsep pembangunan infrastruktur.....	10
C. Konsep pemerintahan desa	15
D. Konsep pembangunan Desa.....	20
E. Konsep pemekaran dalam pembangunan.....	23
a. Pengertian pemekaran.....	23
b. Usaha yang dilakukan pemerintah pasca pemekaran.....	25
F. Kerangka pikir.....	29
G. Defenisi operasional.....	30

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian	33
B. Jenis dan Tipe penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan penelitian.....	35
E. Tehnik pengumpulan data.....	35
F. Tehnik analisis data.....	36

G. Pengapsahan data.....	37
--------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Su'rulangi.....	39
1. Letak Geografis.....	40
2. Penduduk	
3. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam.....	40
4. Kondisi Sosial Budaya.....	41
B. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.....	42
C. Kemampuan Pemerintah dalam Pembangunan.....	46
D. Factor penghambat dan Pendukung.....	55
E. Tingkat Keberhasilan Pembangunan di desa su'rulsngi.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Tanggapan responden tentang peran pemerintah desa dalam Pembangunan Infrastruktur pasca pemekaran di Di Desa Su'rulangi.....	44
2. Tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa su'rulangi	45
3. Tanggapan responden mengenai bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa su'rulangi	46
4. Tanggapan responden tentang kemampuan pemerintah dalam proses evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan.....	52
5. Tanggapan responden tentang komunikasi yang Terbangun antara Pengambilan dan pelaksana kebijakan pembangunan Infrastruktur Wilayah.....	54
6. Tanggapan responden tentang salah satu factor jumlah penduduk Terhadap tingkat pembangunan dan SDM.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara professional kepada daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya, serta perimbangan keuangan antar pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta pemerataan masyarakat dan keadilan serta terkelolanya sumberdaya di daerah secara efektif dan efisien jelas membawa angin segar bagi pencapaian tujuan pembangunan masyarakat di Indonesia.

Namun disadari dengan perubahan paradigm tersebut membuat segala upaya pembangunan dalam rangka mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tanggung jawab daerah yang besar untuk diembang dan dilaksanakan. Sejak dikeluarkan Undang-undang pemerintahan daerah no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, antara pusat dengan daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan kepada masyarakat. Kemudian direvisi dengan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia, kemudian direvisi lagi dengan undang-undang no.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi bahwa “ untuk mewujudkan kepentingan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga yang memenuhi persyaratan”.

Pemerintah daerah terus menerus meningkatkan pelayanan public (juliantara, 2005 : 1). Desa su'rulangi kecamatan polongbangkeng selatan kabupaten takalar sebagai salah satu daerah otonomi dan mempunyai dan mempunyai keistimewaan dalam otonomi tersebut juga telah memiliki beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no. 25 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah di tambah dengan undang-undang no. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Desa su'rulangi kecamatan polongbangkeng selatan kabupaten takalar. Salah satu kewenangan khususnya yang diatur dalam undang-undang no. 18 tahun 2001 tentang pembagian wilayah. Desa su'rulangi kecamatan polongbangkeng selatan kabupaten takalar berwenang untuk menentukan kedudukan, penjenjangan

sebutan wilayah yang ada diwilayahnya yang ditetapkan dengan desa. Hal ini bertujuan sebagai upaya dengan cirri khas desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun masyarakat bawah.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebetulnya adalah dalam rangka mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat bahwa dengan memperhatikan budaya dan lingkungan sehingga mempunyai rasa keadilan kepada masyarakatnya. Sehingga dalam pembangunan masyarakat, aspirasi akan tersalurkan dan mampu menerima berbagai masukan dalam proses pembangunan. Sebagai mana disebutkan allen (sarundajang, 1997 : 30) bahwa peluang untuk berhubungan secara langsung dengan warga masyarakat memungkinkan pimpinan daerah memperoleh lebih banyak pemahaman spesifik mengenai kebutuhan daerah, di samping fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengendalian sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Seiring dengan hal tersebut menyikapi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah maka penataan pemerintahan dilakukan diberbagai daerah adalah penataan wilayah pemerintahan desa dengan tujuan akselerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga secara teoritis perluasan wewenang pemerintah di daerah tersebut diharapkan akan menciptakan kemampuan pemerintahan daerah untuk merespon hak-hak komunitasnya (Fauzi, 2001 : 7). Dengan demikian lebih mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat dan memungkinkan mendapatkan keikut sertaan dan akses terhadap pemerintah akan semakin dekat. Karena dengan rentang kendali yang tidak lagi jauh akan dapat membuat sesuatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih efektif dan efisien.

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2014 dikatakan pembangun desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serata pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Bertitik tolak dari permasalahannya diatas, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan kecamatan yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa. Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa, dalam proses penanggulangannya Hukum tua harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan

perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijelankanya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah peran Hukum tua dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut.

Pada dewasa ini masyarakat menuntut peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk mengarahkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, di perlukan adanya tenaga/unsur penggerak dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka kepala desa memegang peranan yang manentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengembang tugas yang di bebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensiaonal.

Menurut pengamat penulis di Desa su'rulangi kecamatan polongbangkeng selatan kabupaten takalar pembangunan infrastruktur seperti pembangunan balai desa, jalan ke kebun, jalan desa namun pelaksanaannya belum maksimal dan terkesan lambat. Peran pemerintah desa sampai saat ini di rasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di anggap masih kurang adanya kerjasama antar aparat pemerintah terlebih antara aparat dengan masyarakat. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang masalah "*Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar*"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar?
2. Apa factor pendukung dan penghambat pemerintah desa Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

2. Untuk mengetahui Apa factor pendukung dan penghambat pemerintah desa Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

D. Manfaat penelitian

Manfaat peneltian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terlebih ilmu-ilmu social, terlebih secara khusus di siplin ilmu pemeritintahan.
- b. Penelitian ini juga sekiranya dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam hal ini sumbangan pemikiran yang cukup berarti kepada pemerintah desa yakni pemerintah desa melaksanakan peranan dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Kata peran yang sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kekelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi.

Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata peran “peran” ini di beri akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (poerwadarminta 1985 : 735). Dengan demikian kata peranan berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat pelaku yang di harapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002 : 268-269).

Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 441), unsur-unsur peranan atau role adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktifitas yang di mainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peran itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah sesuatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 246).

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus di laksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksananya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. (Soerjono Soekanto, 2002 : 247).

Menurut Komaruddin (1994 : 768), yang dimaksud peranan yaitu:

1. Bagian dari tugas utama yang dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
2. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi dalam setiap variable dalam hubungan.

Jadi peran menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

B. Konsep Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energy. Oleh karena itu, pembangunan sector ini menjadi pondasi dalam pembangunan ekonomi selanjutnya.

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Secara umum, Infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya dengan struktural di bawah satu. Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan *support* atau layanan jasa (*service*).

Definisi teknik mengenai infrastruktur juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memeberikan pelayanan publik yang penting (Kodoatie, Robert J 2003).

Dalam pembangunan infrastruktur berupa jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: Pemukiman, perdagangan, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Untuk hal yang pertama, aspek yang dikaji adalah sejauh mana 'input' yang diperoleh pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel 2000).

Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Infrastruktur dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain:

1. Obyek Rahasia : gedung pusat pemerintahan, gedung pusat keamanan (polisi).

2. Obyek vital : pusat dan jaringan listrik, pusat dan jaringan komunikasi, pusat perdagangan, sarana dan prasarana transportasi, serta sembilan bahan pokok.
3. Obyek umum : bangunan pendidikan, peribadatan, dll.

Uraian diatas menggambarkan tujuan daripada dibangunnya infrastruktur wilayah untuk mendukung dan memenuhi kepentingan masyarakat umum yang berada di daerah desa su'kulangi kecamatan polongbangkeng selatan kabupaten takalar.

Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi, produktifitas marginal dari ibukota pribadi atau (*marginal productivity of private capital*), Sedang dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapat ditunjukkan oleh terciptanya, kenyamanan (*amenities*) dalam lingkungan fisik, terjadinya peningkatan kesejahteraan, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata, terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Infrastruktur juga memiliki dua matra, yaitu matra fisik dan matra pelayanan. Seringkali dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kita lebih memberikan prioritas pada matra fisiknya saja, padahal peran matra jasa pelayanan perlu lebih banyak memperoleh perhatian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa contoh hasil pembangunan infrastruktur di daerah desa su'kulangi adalah jalan, kantor pemerintahan, puskesmas perawatan, pasar, dll, disisi lain pelaksanaan pembangunannya infrastrukture saling tumpang tindih, misalnya untuk hal-hal yang terkait antara lain : jaringan telepon, listrik, tugas, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab pelaku pembangunan dan lain-lain.

Infrastruktur yang baik adalah berjalan sesuai fungsinya, mampu untuk mendukung dinamika dan meningkatkan ekonomi, mensejahterakan masyarakat serta diharapkan dapat berfungsi untuk mendukung bila terjadi bencana alam dll.

Pengertian wilayah yang digunakan dalam perencanaan dapat berarti suatu wilayah yang sangat sempit atau sangat luas, sepanjang di dalamnya terdapat unsur ruang (*space*). Untuk kepentingan perencanaan maka wilayah harus dapat dibagi atau dapat dikelompokkan kedalam satu kesatuan agar dapat dibedakan dengan kesatuan lain. Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi.

Ada dua hal penting yang berkaitan dengan pemekaran wilayah yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- 1. Bagaimana pemerintah melaksanakannya.**
- 2. Bagaimana dampaknya di rasakan masyarakat setelah pemekaran desa tersebut berjalan selama enam tahun.**

Untuk hal yang pertama, aspek yang dikaji adalah sejauh mana '*input*' yang diperoleh pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Glasson (1974) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu *subjektif dan objektif* yaitu: Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang

didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyak wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanya suatu model hanya kita bias membedakan lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya. Hal ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis.

Pandangan objektif menyatakan bahwa wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri gejala alam disetiap wilayah. Wilayah biasa dapat dibedakan musim/temperature yang dimilikinya atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk, atau gabungan dari ciri-ciri diatas. Menggunakan pandangan objektif membuat jenis analisis atas ruang menjadi terbatas.

Menurut Hanafiah (1982) unsur-unsur ruang yang terpenting adalah

1. Jarak
2. Lokasi
3. Bentuk
4. Ukuran atau skala

Artinya, setiap wilayah harus memiliki keempat unsur diatas. Unsur-unsur diatas secara bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lain.

Glasson (1974) mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isinya misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industry, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah belakangannya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, hierarki jalur transportasi, dan lain-lain.

Menurut Haggett (1977) ada tiga jenis wilayah, daerah homogen, daerah nodal, dan merencanakan atau memprogram daerah.

Menurut Hanafiah (1982) wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolute dan konsep relatif. Konsep *absolut* didasarkan pada keadilan fisik sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan faktor sosial ekonomi dari ruang tersebut.

D.Konsep Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

“Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya Desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetarjo, 1984 : 36).

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984 : 15, Yuliati, 2003 :24). Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatra Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat Desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencarian maupun adat istiadatnya.

Defenisi tentang Desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdepatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.

Bintarto (1983) yang memandang Desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai :

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur

fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang dari pada Kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa Desa merupakan tempat tinggal para petani.

Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Wijaya : 2003). Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah "Otonomi Desa" lebih tepat bila diubah menjadi "otonomi masyarakat desa" yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat (Tumpal P. Saragi : 2004).

Perwujudan otonomi masyarakat Desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi, jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan

pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat (Tumpal P. Saragi, Ibid).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran pendapatan dan Belanja serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa.

Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya (Wijaya, loc.cit). Yang pada dasarnya berbagai hak istimewa yang dimiliki desa, dapat dioptimalkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Visi menuju otonomi desa pada dasarnya menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Kemampuan untuk mengurus urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa dan kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa tidak lagi selalu tergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan ada-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No. 32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotongroyong, memiliki adat-istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri yang mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan

pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa :

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

“ pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

“Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rincikan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana tehnik lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayaan seperti Kepala.

b. Konsep Pembangunan Desa

Menurut S P.Siagian (1987 : 2) pembanguna adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/ *nation building*. Sementara Riyono Pratikno (1979 : 119) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana di perkenalkan berbagai gagasan baru kedalam system sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup.

Lebih lanjut Bintaro (1991:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurung sejarah. Berarti jelaslah bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berencana dan di laksanakan secara sadar.
- b. Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik.
- c. Berlangsung terus-menerus.

Taliziduhu Ndraha (1982:71) mengemukakan bahwa: “pembangun desa merupakan setiap pembangunan yang di dalam prosesnya masyarakat desa harus berpartisipasi aktif”.

Sementara Soewignjo (1985:24) juga mengemukakan pendapat mengenai pembangunan desa yaitu : “pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa”.

Dari devenisi di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa keikut sertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan didesanya adalah sangat dominan. Melibatkan mental dan emosi masyarakat desa yang dapat mendorong mereka untuk menyumbang bagi tercapainya tujuan masyarakat dengan jalan mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat.

1. Pembangunan

Terdapat banyak kata yang memiliki makna sama dengan kata ‘pembangunan’. Dari kata tersebutlah istilah ‘pembangunan’ lebih sering digunakan untuk menggambarkan dan memberikan makna perubahan ke arah positif dan lebih maju dibandingkan keadaan sebelumnya. Dalam konteks bahasa *Inggris*, kata pembangunan diartikan sebaga (*development*). Dengan demikian, pembangunan bisa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan, (Conyers dan Hills, 1989; Jameson dan Wilber, 1979). Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan

pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Menurut Todaro (1997), kemajuan ekonomi merupakan komponen penting dalam pembangunan. Namun demikian, pembangunan bukan semata-mata fenomenal ekonomi. Pembangunan harus ditujukan lebih sekedar peningkatan kemakmuran manusia secara materil dan finansial. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multi-dimensional yang melibatkan organisasi dan orientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Meskipun demikian pembangunan menuju pada setiap gerak dan aktivitas demi perbaikan kualitas hidup manusia secara luas, dalam realitas keseharian maknanya kerap menyempit menjadi sekedar upaya perbaikan fisik dan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini selain disebabkan indikator-indikator fisik dan ekonomi memang lebih mudah diukur, di kalangan para ahli telah berkembang suatu anggapan bahwa membangun manusia adalah membangun ekonominya. Demikian kuatnya variable ekonomi ini mempengaruhi perspektif pembangunan, sehingga pada awal perkembangannya, teori-teori pembangunan sangat didominasi oleh paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut, Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial

dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

E. Konsep Pemekaran dalam Pembangunan

a. Pemekaran

Pengertian pemekaran daerah bila dicermati ulang agaknya sedikit membingungkan dan terbalik dengan pemahaman kita selama ini. Pengertian Pemekaran daerah dapat diartikan memekarnya atau mengembang suatu daerah menjadi lebih luas. Sedangkan makna pemekaran daerah, sebagaimana sudah dipahami umum saat ini, adalah terbaginya daerah otonom, Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi beberapa daerah otonom baru.

Secara yuridis formal, UU No. 32 Tahun 2004 sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 129 Tahun 2000 yang di revisi menjadi PP No. 78 tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah saat ini PP No. 129 Tahun 2000 sedang dalam proses penyelesaian revisi menjadi PP No. 78 tahun 2007 merupakan rujukan hukum pemekaran wilayah dari tahun 1999 hingga sekarang. Walaupun baik UU No.32 maupun PP No.129 yang direvisi menjadi PP No.78 sama-sama mengandung kelemahan, namun beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu di ketahui yaitu:

1. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengolahan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban,serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
2. Syarat-syarat pemekaran daerah dan kriteria pembentukan adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan.

3. Prosedur pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya kemampuan politik pemda dan aspirasi masyarakat setempat, didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh pemda. Usulan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memproses lebih lanjut dan menugasi tim untuk observasi ke daerah yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Semua proposal akan dipertimbangkan oleh DPOD yang berkantor di Depdagri.
4. Pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil pendapatan yang di peroleh dari gabungan Kabupaten/ Kota di provinsi baru dan dapat dibantu melalui APBN atau hasil pendapatan yang di peroleh dari Kabupaten/ Kota yang baru dibentuk. Sedangkan segala biaya yang berhubungan dengan penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN.
5. Evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi sampai kepada penghapusannya didahului dengan penilaian kinerja. Apabila setelah *lima tahun* setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensinya tidak mencapai hasil maksimal, maka daerah yang bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah lain. Untuk kepentingan evaluasi ini, setiap tahun daerah wajib menyampaikan data yang terkait kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

b. Usaha yang dilakukan Pemerintah Pasca Pemekaran

Pemekaran Desa merupakan pembentukan Desa baru dengan cara mengembangkannya dari desa yang telah ada. Pembangunan sebagai sebagai suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup

manusia dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Conyers (Maeljarto, 1987 : 31) Menyatakan salah satu ciri utama Nagara berkembang adalah komitmen mereka terhadap pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui perencanaan nasional yang meliputi pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yaitu mensejahterahkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan Desa diarahkan pada kualitas sumberdaya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya Pemekaran Desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena dengan adanya Pemekaran Desa diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah serta pelayanan pada masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi ruang yang sangat leluasa untuk memekarkan diri, hasrat daerah untuk memekarkan diri sangat berkaitan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah melalui jaringan untuk menentukan nasib sendiri (Cahyo, 2004 : 7). Hakikat dan tujuan pemekarang daerah/ daerah otonomi salah satunya adalah mendekatkan pemerintahan pada pelayanan publik (Romli, 2007 : 138). Hal ini juga akan menyebabkan pelayanan publik menjadi efesien dan efektif yang menurut Rondenelli dapat terjadi karena sejumlah hal yakni melalui otonomi terjadi optimilisasi hirarkhi menjadi pelayanan akibat dari penyediaan pelayanan publik dilakukan oleh institusi yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga keputusan-keputusan strategis dapat lebih mudah dibuat, adanya penyusaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada ditingkat lokal, adanya tingkat perawatan terhadap infrastruktur yang ada melalui alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada diwilayahnya, adanya pengalihan fungsi-fungsi rutin dari pusat kepada daerah sehingga pusat lebih berkonsentrasi pada fungsi-fungsi kebijakan, adanya peningkatan kompotisi dalam penyediaan layanan diantara unit-unit pemerintah dan antara sektor publik dan swasta atas arahan pemerintah daerah dan dapat menjadikan birokrasi menjadi lebih beriontasi kepada daerah.

Menurut Rasyid (1998 : 11) tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreatifitasnya demi penciptaan kemajuan bersama. Karena itu komitmen pelayanan yang diinginkan dari aparat pemerintah diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan memelihara ketertiban.

Demikian juga kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa itu, sejauh mungkin diatur secara seragam dan sentralistik, dengan tujuan untuk kepentingan politik pemerintahan.

Dengan dimekarkannya Desa diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sesuai dengan tujuan pemekaran tersebut adalah :

- a) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan/ aktivitas aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat ditingkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna untuk upaya percepatan pembangunan di Desa melalui pendekatan Birokrasi pemerintah kepada masyarakat.
- b) Peningkatan pelayanan publik, yaitu seluruh pelayanan pemerintah terhadap masyarakat luas tanpa adanya diskriminasi, pelayanan ini meliputi kegiatan adimitrasi, kegiatan pelayanan, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan prasana aman bagi masyarakat.
- c) Pemberdayaan potensi wilayah secara maksimal, dimana potensi wilayah adalah seluruh potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
- d) Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, pelibatan masyarakat dalam hal ini adalah kegiatan yang mengikut sertakan masyarakat luas dalam kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur Desa, pembangunan sarana jalan, sarana ibadah, budaya, dan lain-lain.

Tercapainya pembangunan atau kesejahteraan masyarakat tersebut dilihat pada pelayanan publik dari birokrasinya. Aparat desa sebagai birokrat ditingkat desa, aparat ini merupakan pelaksana relatif lengkap dan juga sebagai pemerintah yang letaknya dekat dan mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang digalakkan pemerintah. Aparat Desa harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, efektif dan efisien.

H. Kerangka pikir

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur suatu wilayah, sangat penting artinya Evaluasi kebijakan sebagai suatu proses unpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas di masa yang akan datang, karena hal ini menjadi landasan bagi terciptanya pembangunan infrastruktur wilayah yang serasi dan seimbang diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah mengharuskan kita terutama pemerintah daerah agar peka dan tanggap dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi situasi sedang dan akan terjadi. Evaluasi kebijakan menunjukkan pencapaian yang maksimal terhadap pembangunan infrastruktur wilayah di desa Su'rulangi, setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka pelaksanaan strategis evaluasi kebijakan yang dilakukan harus menunjuk pada kinerja yang telah ditetapkan, baik itu input, output. Dengan cara ini kita dapat memilih prioritas langkah penanganan yang sesuai dan efektif terhadap pembangunan untuk peningkatan kualitas yang termasuk kelestarian sumber daya alam.

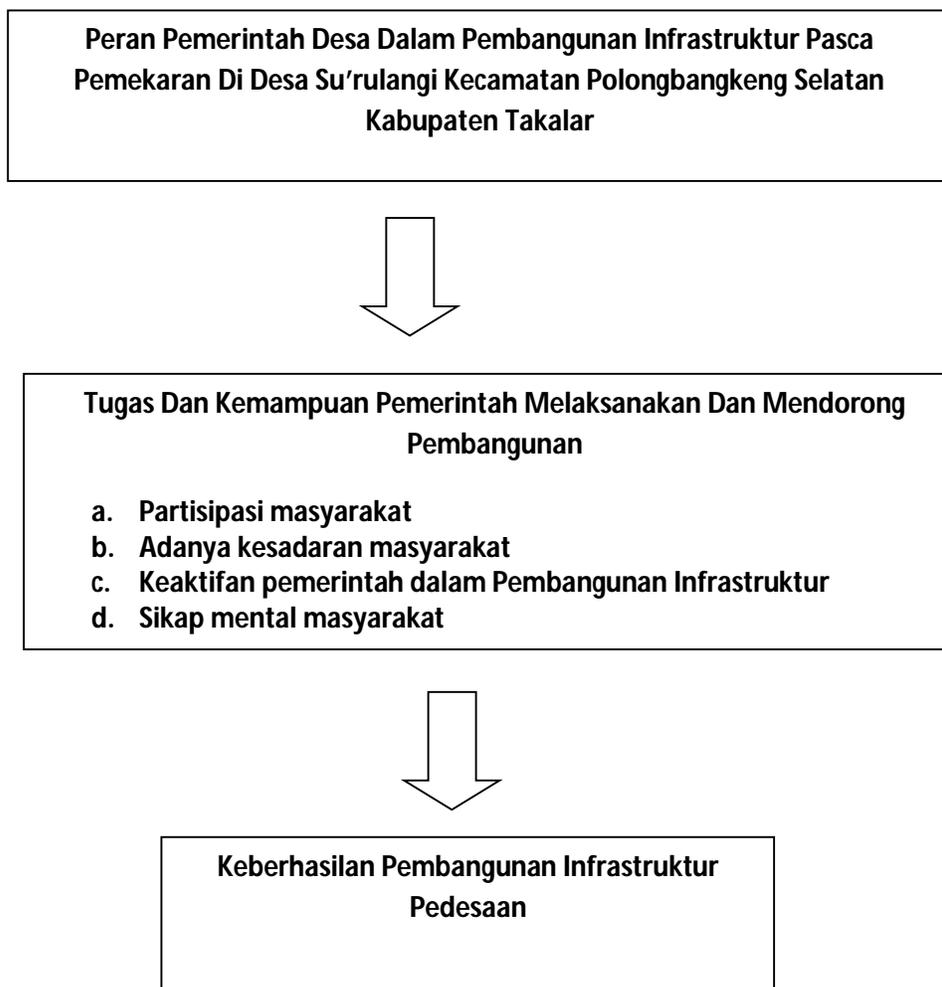
Guna mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur wilayah maka kita dapat melihat bagaimana evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan apakah sesuai dengan yang direncanakan atau sebaliknya. Dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan khususnya di wilayah Desa Su'rulangi, keberadaan rencana tata ruang sangat diperlukan dan menentukan dalam rangka mengakomodir dan mensinkronkan berbagai sektor pembangunan serta menghindari benturan kepentingan satu dan lainnya.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang ditemukan menggambarkan bahwa pelaksanaan rencana tata ruang di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan, belum optimal. Terlihat pembangunan yang berdiri dilokasi Di Desa belum semaksimal sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemeritah daerah dengan itu sangat membutuhkan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah untuk masa yang akan datang.

Ada perbedaan dari yang direncanakan, walaupun dari jumlahnya masih relatip kecil tetapi akan menghambat kepentingan dan keberhasilan pembangunan dengan skopnya jauh lebih besar.

Keberhasilan sebuah kebijakan perlu dipertimbangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaian dari yang sesungguhnya. Berdasarkan dengan hal pelaksanannya, maka langkah-langkah melakukan evaluasi kebijakan bukanlah proses yang kaku, ia dinamis dan cair. Hakekat masalah, tujuan evaluasi, strategi yang akan diterapkan, ketersediaan sumberdaya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses evaluasi kebijakan. Untuk lebih mempermudah uraian tersebut diatas maka digambarkan sebagai berikut.

Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

- Dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan fisik misalnya maka Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai pemerintah yang bersangkutan diharapkan sering memonitoring atau memantau langsung dilapangan untuk melihat keberadaan proyek pembangunan fisik yang

dilaksanakan di Desa Su'rulangi, agar pemerintah dapat mengetahui apakah pembangunan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga pemerintah Desa harus memperhatikan prioritas pembangunan yang akan lebih dirasakan oleh banyak orang atau masyarakat.

b. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakatnya, dipengaruhi oleh lingkungannya, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya.

c. Keaktifan pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur

Dalam setiap pembangunan infrastruktur wilayah di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan salah satu faktor pendukung pembangunan yaitu keaktifannya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, aparat pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam terlaksananya pembangunan dengan adanya partisipasi aparat maka pembangunannya akan terlaksana dengan baik.

d. Sikap mental masyarakat

Pengertian mental yang banyak dipakai dalam ilmu psikologi pada dasarnya berarti 'sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan pikiran manusia dalam menghadapi lingkungannya (*The ABC of Psychology, 1982*). Dalam pengertian ini bisa diartikan bahwa mental merupakan proses yang terjadi didalam diri manusia sebagai akibat hubungan individu dengan individu lain di dalam lingkungannya. Dalam kondisi demikian mental bisa diartikan sebagai sikap.

e. Faktor tradisi masyarakat (kebudayaan)

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat dimana seseorang itu dibesarkan.

f. Keberhasilan pembangunan infrastruktur Pasca pemekaran

Dalam penelitian ini keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan di Desa didefinisikan sebagai tingkat realisasi dari pelaksanaan program-program pembangunan di Desa yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat sebelum perencanaannya. Indikator pengukurannya di lihat partisipasi dan dukungan masyarakat dan tingkat pencapaian sasaran atau target daripada program yang ditetapkan baik dilihat dari segi keberhasilan fisik maupun dari segi manfaatnya bagi masyarakat desa setempat.

a. Partisipasi Masyarakat

b. Jaringan Informasi Dan Komunikasi

c. Sumber Daya Manusia

d. Struktur Birokrasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan objek penelitian adalah seluruh pembangunan infrastruktur Wilaya yang ada pada Desa Su'langi tersebut dan penelitian ini dilaksanakan dengan waktu kurang lebih 3 bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2015.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Menurut Miles dan Huberman (Djam'an Satori dan Aan Komariah 2010:39) langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif, antara lain :

1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Pendekatan kualitatif, lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah

mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai grounded theory research (Sarwono, 2003 dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” Djam’an Satori dan Aan Komariah 2010:39) Sehubungan dengan penelitian ini, penulis akan terjun langsung ke Desa Su’rulangi untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan focus penelitian yaitu tentang Pelayanan Good Governance Pasca Pemekaran di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkengselatan Kabupaten Takalar.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informal) yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar, atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyelesaian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

Penggunaan tehnik ini baru berhenti setela data yang diperoleh lengkap jenuh (*data saturation*). Dengan kata lain data yang didapat sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (*point of theoretical saturation*). Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permuswarakatan Desa, Toko Pemuda, Toko Agama, Toko Masyarakat serta masyarakat di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang berjumlah 30 informan/ responden.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada labolatorium dengan metode ekperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumbernya data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data , misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau tehnik

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007; 62-63).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2003: 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilaksanakan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisis dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan di lapangan, mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan, serta menjelaskan keadaan subjek penelitian dengan seksama dan sesuai dengan yang diteliti.

G. Pengapsahan Data

a. Perpanjangan keikutsertaan

b. Hal ini berarti bahwa peneliti berada pada latar penelitian pada kurung waktu yang dianggap cukup hingga mencapai titik jenuh atas pengumpulan data di lapangan. Waktu akan berpengaruh pada tujuan penelitian baik pada kualitas maupun kuantitasnya terhadap beberapa alasan dilakukannya teknik ini, yaitu untuk membangun kepercayaan informan/ subjektif dan kepercayaan peneliti sendiri, menghindari distorsi (kesalahan) dan bias, serta mempelajari lebih dalam tentang latar dan subjek penelitian.

c. Ketekunan pengamat

Mengandung makna mencari secara konsisten dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau kontatif dalam menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan fokus penelitian untuk lebih dicermati. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kedalaman penelitian yang maksimal.

d. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap temuan data. Denzim dalam Moleong mengajukan empat macam triangulasi: sumber, metode, penyidik, dan teori.

e. Auditing

Teknik ini berkaitan erat dengan kriteria kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan terhadap proses dan hasil penelitian. Proses auditing terdiri dari : pra-entri, penetapan hal-hal yang dapat diaudit, kesepakatan formal dan penentuan keabsahan data.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBAR UMUM DESA SU'RULANGI

Desa su'rulangi merupakan salah satu desa yang terletak Di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Su'rulangi dapat ditempuh selama \pm 20 menit dari ibu kota kabupaten melalui jalan raya poros Jenderal Sudirman.

1. Letak Geografis

Berikut ini adalah batas-batas Desa Su'rulangi :

- Sebelah utara : sungai
 - Sebelah selatan : sungai
 - Sebelah barat : Desa Cakura
 - Sebelah timur : Kelurahan Bulukunyi

Desa Su'rulangi terbagi kedalam lima dusun yaitu :

1. Dusun Su'rulangi
2. Dusun Tipacera
3. Dusun Panje'ne kang
4. Dusun Panaikang
5. Dusun Bontomanai

Secara umum keadaan topografi Desa Su'rulangi adalah daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Iklim desa Su'rulangi sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

2. Penduduk

Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu wilayah. mereka menetap dan membangun kebudayaan (adat istiadat) sebagai hasil interaksi kehidupan sehari-hari. dalam

pembagiannya, secara umum penduduk dibagi atas penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Dalam hal ini berlaku pula dalam perhitungan jumlah penduduk di desa Su'rulangi. Penduduk desa Su'rulangi mayoritas adalah suku Makassar yang merupakan penduduk asli. Berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah penduduk desa Su'rulangi dalam kurung tahun 2015. Data jumlah penduduk ini merupakan data yang tersaji dalam pemerintah desa setempat. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2015.

Tabel. Jumlah penduduk desa Su'rulangi 2015

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk(jiwa)	Per-
1.	Laki-laki	433 jiwa	43,
2.	Perempuan	531 jiwa	57,
	Jumlah	964 jiwa	100

3. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Mata pencaharian warga [desa Su'rulangi](#) cukup beragam. Keberagaman ini didasarkan banyaknya lapangan kerja potensial di daerah ini. Selain itu, tingginya kebutuhan akan pekerjaan tertentu membuat masyarakat menciptakan lapangan kerja sendiri yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Beberapa besar tenaga kerja terserap di bagian pertanian. Hal ini disebabkan luasnya lahan yang tersedia untuk digarap dan lahan yang relatif subur untuk dibuat menjadi sebagai lahan pertanian. Secara umum, mata pencaharian masyarakat [desa Su'rulangi](#) yaitu petani/peladang, dan beberapa kecil yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pedagang. Dalam menjalankan rutinitas mata pencaharian sehari-hari, beberapa

masyarakat juga memelihara binatang ternak seperti sapi, itik, dan ayam. Selain itu di [desa Su'rulangi](#) juga terkenal dengan kerajinan anyaman bambu, namun dalam perkembangannya masih memiliki beberapa kendala diantaranya kurangnya modal usaha dalam pengerjaan usaha tersebut dan kurangnya pelatihan lanjutan untuk menekuni anyaman bambu tersebut.

4. Kondisi Sosial-Budaya

Warga [desa Su'rulangi](#) beberapa besar adalah [suku Makassar](#), dengan kata lain warga [desa Su'rulangi](#) sangat homogen. Darah Makassar yang terkenal kuat mempertahankan adat dan kebudayaannya serta kearifan lokal yang dijalankan oleh setiap warga memberikan dampak secara terus terhadap hubungan kekeluargaan yang sangat harmonis di masyarakatnya. *Amuntuli gorontigi* adalah salah satu tradisi masyarakat setempat yang masih bertahan sampai sekarang. Tradisi tersebut dilanjutkan oleh setiap rakyat yang akan melangsungkan kegiatan pernikahan dengan membawa kue-kue menuju rumah kepala desa sambil diikuti dengan suara gendang yang dipukul oleh beberapa rakyat pria.

Bahasa

Secara umum, masyarakat [desa Su'rulangi](#) menggunakan [bahasa Makassar](#) dalam berinteraksi sehari-hari. Adapun selebihnya menggunakan [bahasa Indonesia](#).

Agama

Masyarakat [desa Su'rulangi](#) mayoritas memeluk [agama Islam](#)

B. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Dengan berpatokan pada situasi yang sudah digambarkan sebelumnya, apabila pemerintah menjalankan dengan sebaik mungkin, maka itu dapat mendorong masyarakat untuk turut atau ikut serta secara aktif dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka pembangunan tentunya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Oleh sebab itu, maka pembangunan yang direncanakan harus sesuai dengan kemauan

masyarakat disamping dukungan atau partisipasi yang dimiliki masyarakat untuk menyukseskan setiap gerak pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dengan dimekarkannya Desa diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sesuai dengan tujuan pemekaran tersebut adalah :

- a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan/ aktivitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat ditingkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna untuk upaya percepatan pembangunan di Desa melalui pendekatan Birokrasi pemerintah kepada masyarakat.
- b. Peningkatan pelayanan public, yaitu seluruh pelayanan pemerintah terhadap masyarakat luas tanpa adanya diskriminasi, pelayanan ini meliputi kegiatan administrasi, kegiatan pelayanan, ketersediaan saran pendidikan, kesehatan, dan prasana aman bagi masyarakat.
- c. Pemberdayaan potensi wilayah secara maksimal, dimana potensi wilayah adalah seluruh potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
- d. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, pelibatan masyarakat dalam hal ini adalah kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat luas dalam kegiatan pembangunan seperti pembangun infrastruktur Desa , pembangunan saran jalan, saran ibada, budaya dan lain-lain.

Tercapainya pembangunan atau kesejahteraan masyarakat tersebut dilihat dari pelayan public dari birokrasinya. Aparat desa sebagai birokrat ditingkat desa, aparat ini merupakan pelaksana relative lengkap dan juga sebagai pemerintah yang letaknya dekat dan mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang digalakkan pemerintah. Aparat desa harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, efektif dan efisien.

a. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat yaitu berupa

partisipasi tenaga, ide-ide atau pemikiran, partisipasi dalam bentuk harta benda (uang), bahan-bahan material, dan partisipasi dalam bentuk pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, dapat dikatakan tinggi tingkat partisipasinya, hal ini berdasarkan hasil penelitian kepada semua informan yang ada.

Tabel 1: Tanggapan responden tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di desa Su'rulangi.

Kriteria	Frekuensi	Presentase
Sangat baik	5	16,66%
Baik	12	40%
Kurang baik	13	43,33%
Tidak baik	-	-
Jumlah	30	100%

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2015

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang kebijakan pemekaran kecamatan dalam pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kecamatan Seram Utara Barat, responden yang menyatakan sangat baik, 16,66% menyatakan baik, 40% menyatakan kurang baik, 43,33% dan menyatakan tidak baik, tidak ada.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang salah satunya adalah Abd. Malik yang berpendapat demikian “bentuk partisipasi masyarakat sudah tinggi karena sudah banyak yang memberi bantuan kepada pemerintah baik dalam bentuk pemeliharaan pembangunan di desa su'rulangi ini, Cuman kita lihat belum sepenuhnya masyarakat yang mendukung dengan kita salah satu dari masyarakat yang memberikan bantuan tenaga pada waktu pemerintah mengadakan program pembuatan talut”.

Melihat hasil penelitian dan pendapat dari salah seorang masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa sudah banyak masyarakat yang berpartisipasi lewat sumbangan tenaga, ini disebabkan karena

melihat tingkat partisipasi tenaga yang sudah masyarakat berikan dalam pelaksanaan pembangunan berupartisipasi secara aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Jika dilihat dari partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi ide-ide atau pemikiran yang masyarakat berikan untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tergolong tinggi.

Tabel 2: Tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa su'rulangi

Kriteria	Frekuensi	Presentase
Sangat maksimal	9	30%
Maksimal	9	30%
Kurang maksimal	12	40%
Tidak maksimal	-	-
Jumlah	30	100%

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2015

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa su'rulangi, yang menyatakan sangat maksimal 30% menyatakan maksimal 30% menyatakan kurang maksimal 40% dan tidak maksimal tidak ada.

Salah satu pelaksanaan pembangunan bukan saja ditunjukkan lebih sekedar peningkatan kemakmuran masyarakat secara material dan financial. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multi-dimensional yang melibatkan organisasi dan orientasi system ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Meskipun demikian pembangunan menuju pada setiap gerak dan aktivitas demi perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas, dalam realitas keseharian maknanya kerap menyempit menjadi sekedar upaya perbaikan fisik dan ekonomi suatu masyarakat. Seperti apa yang di sampaikan oleh, Deddy

T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Tabel 3: Tanggapan responden mengenai bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Su'rulangi

Kriteria	Frekuensi	Presentase
Sangat maksimal	2	6,66%
Maksimal	8	26,66%
Kurang maksimal	11	36,66%
Tidak maksimal	9	30%
Jumlah	30	100%

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2015

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Su'rulangi, yang menyatakan sangat maksimal, 6,66% menyatakan maksimal, 26,66% menyatakan kurang maksimal, 36,66% menyatakan tidak maksimal 30%.

Perubahan yang sangat signifikan terjadi menuju pada tingkat kesejahteraan masyarakat ketika pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah sangat merata dan dapat di rasakan oleh masyarakat setempat baik itu kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas.

Sesuai dengan hasil operasi para peneliti di lapangan bahwasanya Pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah yang di laksanakan oleh pemerintah daerah belum terrealisasi dengan baik. Padahal salah satu tujuan daripada pemekaran kecamatan adalah pembangunan yang merata, namun ada beberapa pembangunan yang belum di laksanakan oleh pemerintah daerah, seperti Pos Keamanan Kepolisian, TNI, Jalan dan Kantor UPTD yang sekarang masi di tempatkan di Sekola SD. Kalau mau di lihat dalam konteks pembangunan saat ini di Kecamatan Seram Utara Barat seakan-akan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah daerah masi sangat minim. Sedangkan defimisi dari pembangunan yang di artikan oleh (Conyers dan Hills, 1989; Jameson dan Wilber, 1979), Pembangunan bisa diartikan

sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan. Sehingga di harapkan kepada pemerintah daerah agar kedepanya dapat membangun Desa Su'kulangi lebih baik lagi dan bertanggung jawab terhadap pembangunannya.

Hasil wawancara penulis dengan anggota Bapoda Kasuban Perencanaan dan Laporan Desa Su'kulangi, mengenai alokasi dana pembangunan dari Pemerintah Desa Su'kulangi dalam rangka penataan infrastruktur wilayah:

“Untuk peningkatan percepatan pembangunan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dengan peningkatannya semua sarana-prasarana di daerah Kecamatan, setiap tahun di daerah Pedesaan itu ada bantuan dana yang di berikan dari pemerinta daerah, dan ada juga proyek, pembangunan jalan, air bersi dan bantuan yg lain-lain”.(H S. 15 Juni 2015).

Dalam sebuah pembangunan tidak akan berarti lebih tanpa adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah dan terutama masyarakat penggunanya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk partisipasi berupa memelihara hasil pembangunan yang lakukan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan pembanguan didapati jawaban dari setengah informan menjawab akan berpartisipasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan. “Semua torang akan merawat hasil pembangunan yang pemerintah desa buat, karena kami juga turut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaanya”. Menurut bapak Dg Ngitung.

Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dikatakan tinggi karena masyarakat sudah bisa menyadari dan mengerti akan pentingnya pembangunan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam melibatkan diri secara akti dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Su'kulangi adalah dalam bentuk tenaga karena masyarakat di Desa Su'kulangi dikenal dengan sifatnya yang gotong royong atau kerja sama sedangkan partisipasi dalam bentuk lainnya seperti yang sudah dijelaskan di atas, hanya mereka yang mempunyai kelebihan harta benda (uang).

Dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik sebenarnya tidak cukup kalau hanya partisipasi tenaga yang lebih banyak diebrikan oleh masyarakat karena disamping tenaga yang diperoleh masyarakat, ada juga bentuk-bentuk partisipasi yang lain yang tidak kalah pentingnya dengan partisipasi tenaga yaitu partisipasi dalam bentuk harta benda (uang), bahan-bahan material, dan terutama dalam hal memelihara hasil-hasil pembangunan, agar pembangunan yang sudah dilakukan atau dilaksanakan berhasil dengan baik dan dapat digunakan secara bersama-sama dan bisa bertahan lama.

Selain partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda (uang) dan bahan-bahan material, juga sangat perlu atau seharusnya lebih banyak masyarakat berikan agar supaya pembangunan yang dilaksanakan itu benar-benar sesuai dengan aspirasi dan keinginan langsung dari masyarakat sebab masyarakat pula yang nantinya akan merasakan langsung hasil pembangunan tersebut karena masyarakat sendiri yang bersama-sama mengerjakan lewat tenaga maupun dalam bentuk partisipasi lain seperti yang sudah disebutkan di atas. Dengan demikian, untuk memperoleh partisipasi secara aktif dari masyarakat tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah yang ada di Desa Su'rulangi dalam mengimplementasikan kebijakan serta peranan dari seorang Hukum Tua dan perangkat desa yang ada untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk menuju kesuksesan pelaksanaan pembangunan.

B. Kemampuan Pemerintah Melaksanakan Pembangunan

Pembangunan selalu dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah penapaian pertumbuhan masyarakat, yang tentunya harus dengan menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain dari pada itu, dalam pelaksanaan pembangunan juga harus diperhitungkan akan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan yang ada.

Pemerintah di Desa Su'rulangi sebagai pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Su'rulangi. Dapat dikatakan demikian karena pemerintah diharapkan mampu menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau yang dilaksanakan. Hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa setiap kebijakan ataupun keputusan dari para pemimpin/ pemerintah desa akan terjadi langsung di lapangan karena dengan begitu setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin itu benar-benar terlaksana dengan baik atau setidaknya bisa dirasakan hasil dari kebijakan tersebut dan atau mungkin kebijakan tersebut bisa menyerap aspirasi masyarakat atau tidak. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan dilaksanakan itu benar-benar dapat menyerap aspirasi masyarakat karena dalam setiap pengambilan keputusan untuk dijadikan sebuah kebijakan bersama, maka seorang pemimpin seperti Hukum Tua beserta perangkatnya harus melibatkan masyarakat agar kebijakan tersebut yang nantinya akan dilaksanakan itu dapat menyerap aspirasi dari masyarakat, seperti hanya dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan fisik misalnya maka Hukum Tua beserta perangkatnya sebagai pemerintah yang bersangkutan diharapkan sering memonitoring atau memantau langsung di lapangan untuk melihat keberadaan proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan di desa Su'rulangi, agar pemerintah dapat mengetahui apakah pembangunan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga, pemerintah desa harus memperhatikan prioritas pembangunan yang akan lebih dirasakan oleh banyak orang atau masyarakat.

Kemudian pembangunan yang dilaksanakan harus diupayakan seiring bagaimana pemerintah desa dapat menumbuhkan sikap kemandirian dan keterlibatan masyarakat untuk dapat berusaha sendiri

dan ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan demi untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga masyarakat juga diharapkan tidak terjerat dalam kemiskinan.

Peran masyarakat pada umumnya tentu tidak akan lepas dari setiap pelaksanaan pembangunan karena tanggung jawab dalam pembangunan tidak semata-mata berada di tangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari pada pembangunan tersebut. Maka dengan demikian sangat dibutuhkan keterlibatan, keseriusan dan peran aktif dari pemerintah sebagai administrator dalam menyukseskan program-program mengenai pembangunan.

Dari hasil pengamatan penulis di Desa Su'rulangi dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan maka sasaran penulis yaitu untuk melihat tingkat frekuensi usaha pemerintah dalam proses perenanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan pemerintah dalam proses perencanaan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan para informan menjawab aparat pemerintah desa mampu dalam proses perencanaan kebijakan, yang lainnya menjawab menjawab kurang mampu.

“kalau kata pemerintah desa Su'rulangi sudah mantap kalau perencanaan, karena sudah banyak pembangunan yang mereka adakan”.karena tidak mungkin tidak ada pembangunan tanpa ada rencana lebih dulu. Menurut M R.

Melihat tingkat jawaban para informan di atas maka disimpulkan bahwa pemerintah sering mengimplementasikan kebijakan, ini disebabkan karena pemerintah melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang berada di wilayah kepemimpinannya yaitu di Su'rulangi berpartisipasi secara aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Berikurnya peneliti melanjutkan penelitian pada tingkat kemampuan pemerintah dalam proses evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden menjawab pemerintah sudah mampu mengevaluasi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan karena selama ini pekerjaan pembangunan sudah berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan penuturan oleh sekretaris desa Su'rulangi dan hanya kecil sebagian informan yang menjawab kurang mampu hal ini disebabkan karena mereka belum melihat atau mendengar laporan pertanggungjawaban dari pemerintah walaupun pekerjaan sudah berjalan dengan baik.

Melihat hasil yang didapatkan di atas maka, disimpulkan bahwa pemerintah sering mengevaluasi kebijakan, ini disebabkan karena pemerintah melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang berada di wilayah kepemimpinannya yaitu di Desa Su'rulangi berpartisipasi secara aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan dewasa ini, maka masyarakat semakin kritis dengan adanya era globalisasi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang kian pesat perkembangannya sehingga mendorong aparat pemerintah untuk menciptakan kondisi yang dinamis dalam setiap bidang kerja yang dilakukan agar mudah untuk dilakukan. Pemerintah selaku pemerintah di Desa harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan masyarakat banyak seperti dalam memahami aspirasi maupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan baik itu berasal dari pemerintah, pemimpin maupun secara kemasyarakatan yang disampaikan oleh masyarakat, apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu atau sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.

Kemudian dalam proses pelaksanaan kebijakan, pemerintah harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam suatu

kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut dilaksanakan tidak merugikan satu pihak ataupun menghambat program pemerintah, dan dilain pihak juga masyarakat akan merasa aspirasi mereka didengar sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Desa Su'rulangi termasuk desa yang luas atau besar, sehingga dengan memahami luasnya Desa Su'rulangi berarti cakupan tugas pemerintah juga bisa dikatakan tidak mudah dan dengan mengingat pula untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah dengan masyarakat serta antara masyarakat itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kunci

keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepemimpinan yang tegas serta arif dan bijaksana yang diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa mampu dengan melihat semangat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab semangat bekerja sama yang diperlihatkan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

Tabel 5: Tanggapan responden tentang komunikasi yang terbangun antara pengambil dan pelaksana kebijakan pembangunan Infrastruktur Wilayah.

Kriteria	Frekuensi	Presentase
Sangat maksimal	4	13,33%
Maksimal	14	46,66%
Kurang maksimal	12	40%
Tidak maksimal	-	-
Jumlah	30	100%

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2015

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang komunikasi yang terbangun antara pengambil dan pelaksan kebijakan pembangunan Infrastruktur Wilayah di Desa

Su'ralangi, 13,33% dari responden yang menyatakan sangat maksimal, 46,66% menyatakan maksimal, 40% menyatakan kurang maksimal, dan menyatakan tidak maksimal tidak ada.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, mengenai sikap pelaksana dalam evaluasi kebijakan pemekaran kecamatan dalam pembanguna infrastruktur wilayah:

“Sejauh ini komunikasi yang dibangun antara pemerintah Kota dengan pihak Desa maksimal. Dalam melihat kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan harusnya pihak Desa dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap pembangunan, sehingga proses pengembangan kebijakan dapat diketahui dan sekaligus disosialisasikan”. (M S.29 Juni 2015).

C. Faktor Penghambat Dalam Pembangunan

Mengenai kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan maupun kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, maka dapatlah dipahami bagaimana luas dan kompleksnya permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasayarakatan. Dalam menunjang keberhasilan dari seorang pemimpin seperti pemerintah, maka bukan saja diukur dari segi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ataupun penyelenggaraan program pembangunan dan kemasayarakatan, tetapi juga bagaimana seorang pemerintah mampu menumbuh kembangkan partisipasi baik berupa dukungan penuh dari masyarakat maupun sumbangansumbangan lainnya yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk menyukseskan pembangunan yang akan diselenggarakan ataupun kebisaan yang dihadapi oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif pada setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Kendala-kendala maupun kebisaankebisaan yang dihadapi oleh pemerintah antara lain :

- a. Kesadaran Masyarakat
- b. Kurang aktifnya aparat pemerintah
- c. Sikap Mental Masyarakat.

d. Faktor Tradisi Masyarakat

Dari keseluruhan kendala ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya memiliki keseriusan maupun perhatian utama dari pemerintah yang ada di desa Su'rulangi, lewat kemampuan maupun kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi maupun memecahkan kendala-kendala maupun kebiasaan-kebiasaan tersebut dengan sebaik mungkin.

a. Kesadaran masyarakat

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa tahu, dan mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja (1984 ; 46) menyatakan bahwa “kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu”.

Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakatnya, dipengaruhi oleh lingkungannya, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahannya.

b. Keaktifannya Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur

Dalam setiap pembangunan infrastruktur wilayah di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan salah satu faktor pendukung pembangunan yaitu keaktifannya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, aparat pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam terlaksananya pembangunan dengan adanya partisipasi aparat maka pembangunannya akan terlaksana dengan baik.

Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Takalar semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari beberapa tahun belakangan ini, proses pembangunan infrastruktur wilayah yang dilakukan pemerintah daerah di Kecamatan Polongbangkeng Selatan ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh hal-hal negatif dari

masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Salah satu gejala negatif yang muncul di tengah masyarakat, yakni tumbuhnya sebuah sikap yang apatis terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Sekurang-kurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang akan dilakukan.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Su'rulangi, Faktor penghambat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan:

“Pembangunan yang terjadi di Kecamatan Polongbangkeng Selatan ini yang menjadi kendala di lapangan dalam proses pembangunan yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat yang ada di daerah Kecamatan itu sendiri, sehingga pembangua berjalan kurang baik dan pemerintah daerah harus bagaimana caranya untuk setiap pembangunan yang di lakukan harus mengundang partisipasi dari masyarakat Kecamatan Polongbangkeng Selatan”. (S.S 23 Juni 2015).

c. Sikap mental masyarakat

Pengertian mental yang banyak dipakai dalam ilmu psikologi pada dasarnya berarti sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan fikiran manusia dalam menghadapi lingkungannya (The ABC of psychology, 1982). Dari pengertian ini bisa diartikan bahwa mental merupakan proses yang terjadi didalam lingkungannya. Dalam kondisi demikian mental bisa diartikan sebagai sikap.

d. Factor tradisi masyarakat (kebudayaan)

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat dimana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain :

1. Nilai-nilai (*values*)

Didalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang lebih dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku dimasyarakat itu.

2. Adat dan tradisi

Adat dan tradisi yang berlaku di sebuah daerah, disamping menemukan nilai-nilai yang harus ditandai oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkalaku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang.

3. Pengetahuan dan keterampilan

Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupan.

4. Bahasa

Disamping factor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan diatas, bahasa merupakan salah satu factor yang turut menentukan cirri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berfikir yang dapat menentukan bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak dan bereaksi serta bergaul dengan orang lain.

Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijelaskan diatas dalam proses penggunaannya, entah apakah akan dihilangkan secara keseluruhan ataupun hanya sekedar mengurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah tertanam cukup lama dalam diri setiap masyarakat.

Jadi pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya agar dapat memperhatikan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat mengingat masyarakat yang lebih menjemuk dan sehubungan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Jadi pemerintah dalam hal ini agar selalu arif dan bijaksana dalam mengambil maupun menjalankan kebijakannya, agar tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

e. Tingkat Keberhasilan Pembangunan di Desa Su'rulangi

Dalam penelitian ini keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan di desa didefinisikan sebagai tingkat realisasi dari pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat sebelum perencanaannya. Indikator pengukurannya dilihat dari partisipasi dan

dukungan masyarakat dan tingkat pencapaian sasaran atau target daripada program yang ditetapkan baik dilihat dari segi keberhasilan fisik maupun dari segi manfaatnya bagi masyarakat desa setempat.

a. Partisipasi masyarakat

Peran serta dukungan masyarakat yang ada di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan merupakan faktor pendukung bagi pembanguna Infrastruktur wilayah di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah ikut serta aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan berupa proyek yang di laksanakan oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur wilayah. Diantaranya pembangunan Puskesmas rawat ginap, Gedung Sekolah, Pasar, dan jalan tani serta irigasi untuk melancarkan jalannya air kepersawahan, dari beberapa pembangunan sarana-prasaranayang di laksanakan di desa su'rulangi ini berjalan dengan lancar karena adanya partisipasi dari masyarakat Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Su'rulangi, mengenai partisipasi masyarakat terhadap pembangunan:

“Pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung adanya kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah di Desa Su'rulangi, Pembangunan infrastruktur wilayah perlu ditingkatkan, terutamanya itu ada beberapa sarana dan prasarana yang belum terlaksana seperti Sekolah, Kantor Kepolisian keamanan, dan beberapa ruas jalan yang ada di Desa Su'rulangi” (S S. 23 Juni 2015).

Sesuai dengan hasil opserpasi para penulis di lapangan bahwasanya setiap pembangunan yang di canangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar terhadap berbagai pembangunan sarana dan prasarana di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan masyarakat sangat mendukung bahkan masyarakatpun turut di libatkan dalam pembangunan berbagai Infrastruktur yang ada sehingga pembangunan itu berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah setempat, namun masyarakat sangat mengharapkan kepada pemerintahan daerah agar dapat melihat beberap pembangunan yang belum terlaksana di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

b. Jaringan informasi dan komunikasi

Salah satu faktor pendukung terlaksanannya pembangunan di Desa Su'rulangi yaitu jaringan informasi dan komunikasi yang dimana ketika ada suatu bentuk kerjasama baik itu secara external maupun internal maka hubungan komunikasi, konsolidasi dan kerjasama ini perlu di tingkatkan agar dapat mencapai hasil yang sangat maksimal terhadap pembangunan yang akan di laksanakan, sehingga tingkat kepuasan dari pembangunan itu dapat di rasakan oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah tertentu seperti masyarakat yang ada di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Su'rulangi, mengenai hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan dalam rangka pembangunan infrastruktur wilayah:

“Sebenarnya hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan sangat baik, karna setiap saat pembangunan selalu ada di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan di lihat dari pembangunan air bersi yang di lakukan oleh PMPM Mandiri ada juga pembanguna-pembangunan yang lain” (S S. 23 Juni 2015).

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai pelaksanaan pembangunan di Desa Su'rulangi didapati sebagian besar informan menilai pelaksanaan pembangunan di Desa Su'rulangi sudah berhasil, hanya sebagian yang menjawab pelaksanaan pembangunan kurang berhasil mereka beralasan masih adanya pembangunan seperti penyelesaian jalan kekebun yang belum rampung dan beberapa kegiatan pembangunan balai desa yang masih harus ditambah. Berdasarkan data yang sedah diperoleh, dapat diaambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Su'rulangi sebagian besar berhasil dan masih ada yang harus dibenahi yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan kurang berhasil. Berdasarkan hasil di atas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Su'rulangi oleh pemerintah Desa Su'rulangi berhasil.

c. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap pengelolaan atau pengembangan suatu kebijakan, dalam Mengevaluasi kebijakan terhadap pembangunan infrastruktur wilayah tentunya aspek sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya evaluasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Camat Kecamatan Polongbangkeng Selatan dituntut menjalankan seluruh kebijakan dengan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada.

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam Pembangunan Infrastruktur Wilayah khususnya Dinas Pekerjaan Umum yang di jalankan melalui Kepala Desa Su'rulangi dalam pengembangan sumber daya manusia diharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan baru dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk dapat mengatur dan mengembangkan di Desa Su'rulangi yang lebih maju dan lebih baik lagi kedepannya.

Tabel 6: Tanggapan responden tentang salah satu faktor jumlah penduduk terhadap tingkat pembangunan dan SDM.

Kriteria	Frekuensi	Presentase
Sangat mampu	6	20%
Mampu	6	20%
Kurang mampu	11	36,66%
Tidak mampu	7	23,33%
Jumlah	30	100%

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2015

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang salah satu faktor jumlah penduduk terhadap tingkat pembangunan dan SDM di di Desa Su'rulangi, responden yang menyatakan sangat mampu, 20% menyatakan mampu, 20% menyatakan kurang mampu, 36,66% dan 23,33% menyatakan tidak mampu.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Su'rulangi mengenai faktor pendukung SDM terhadap Pembangunan Infrastruktur Wilayah.

“Dari sisi sumber daya manusia di Desa Su'rulangi masih minim, oleh karena itu pembangunan infrastruktur wilayah masih kurang di Desa Su'rulangi harus mempunyai sekolah atau pendidikan tinggi yang nantinya akan menciptakan SDM yang mempunyai skil, dan jiwa-jiwa lidersip, melalui sekolah tinggi yang nantinya bisa di persiapkan sebagai tenaga-tenaga sumber daya manusia yang berkualitas”.(S S. 23 Juni 2015).

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat esensial dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan data di lapangan diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Su'rulangi masih kurang mampu, khususnya untuk tingkat SMP dan SMA ke atas. Karena kurangnya dana sehinga masyarakat yang ada di Desa Su'rulangi tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan keperguruan yang lebih tingih. Tingkat pendidikan yang ada juga masi terbatas hal ini, dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan perlu mendapat perhatian dari pada pemerintah daerah agar dapat menciptakan SDM yang berkualitas dan berguna bagi Desa Su'rulangi kedepan.

d. Struktur birokrasi

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan salah satu *stakeholder* pembangunan infrastruktur wilayah dan karena itu memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan infrastruktur wilayah. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan di dalam perencanaan, kebijakan dan pengelolaan pembangunan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi di daerah dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut. keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah

Kecamatan pada akhirnya sangat tergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber dana terhadap pembangunan yang ada.

Kepala Desa Su'rulangi di dalam menjalankan peran strategisnya tersebut dalam perencanaan, pembanguna infrastruktur wilayah terhadap sarana-prasarana dan manajemen dalam pembangunan masih terbatas. Hal ini disebabkan tidak saja oleh tugas dan kewenangan birokrasi pemerintah daerah yang masih tumpang-tindih dengan birokrasi terkait lainnya, melainkan juga terutama oleh realitas sistem, promosi di lingkungan birokrasi pemerintah daerah yang terlalu didasarkan pada kepentingan-kepentingan individu. Ketika seorang pemimpin dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai pengambil keputusan dengan demikian menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah Pedesaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperang dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah bisa dianggap mampu, karena sesuai dengan hasil jawaban dan informan.
- b. Dalam setiap pembangunan yang di jalankan di desa su'rulangi pembangunan infrastruktur, maka pemerintah selaku aparatur pemerintah daerah di desa su'rulangi memiliki kemampuan yang cukup dalam menyelenggarakan program pembangunan tersebut, karena pemerintah dalam hal ini sebagai administrator di bidang pembangunan dan pemerintahan sekaligus sebagai administrator dibidang kemasyarakatan sudah menjalankan perannya dengan baik.
- c. Dari hasil penelitian, baik dilihat dari segi peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa factor penghambat seperti yang sudah disebutkan diatas sebelumnya, namun hal demikian masih dapat diaantisipasi oleh pemerintah lewat motivasi yang disampaikan secara langsung serta melalui meningkatkan efektivitas kerja setiap aparatur yang ada di desa su'rulangi.
- d. Dalam melaksanakan tugas pemerintah sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena pemerintah sering terjun langsung kelapangan untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang sementara dikerjakan dan dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperlihatkan oleh pemerintah selaku aparat pemerintah yang ada di Desa Su'rulangi, antara lain :

- a. Segala bentuk kegiatan, baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan, sudah boleh dikatakan berperan dan mampu, akan tetapi pemerintah harus terus melakukan hal-hal yang menurut masyarakat itu baik dan dapat menyerap setiap aspirasi yang mereka sampaikan.
- b. Dalam menjalankan program pembangunan, sangat perlu untuk melibatkan masyarakat, maka dengan demikian akan tercipta suatu hubungan dan kinerja yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggungjawab atas pembangunan tersebut serta akan memelihara akan hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- c. Dan hal yang terpenting untuk perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dalam melakukan hal-hal pembangunan secara signifikan kepada masyarakat dengan jalan menanamkan kesadaran penuh kepada mereka akan pentingnya pembangunan itu. Karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pikiran setiap anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah juga milik diri seluruh masyarakat yang ada di dunia khususnya bagi mereka yang tinggal dan menetap di desa Su'rulangi.
- d. Strategi pembangunan infrastruktur wilayah di desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar.
- e. Mengoptimalkan pasilitas yang ada didalam kantor-kantor yang ada di desa Su'rulangi berupa kantor Desa, Puskesmas Perawatan, Gedung Sekolah dan sarana-prasarana lainnya yang ada di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
- f. Meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur wilayah serta melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan demi pembangunan infrastruktur wilayah di desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, 2000. *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta,. Bandung.
- Abidin, said Zaenal. *Kebijakan Public Policy*, Jakarta, Pancar Siwah, 2004
- Abdurahman. (1987), *Beberapa Pamikiran Tentang Otonomi Daerah, PT. Media Sarana*. Jakarta
- Anderson, Jmes E 1984. *Public Police Making*. Hotl Rinehart and Winston, New York.
- Bayu Suryaningrat, 1976, *Pemerintahan Dan Administrasi Desa*, Yayasan Beringin Korpri Unit Depdarge, Jakarta.
- Deddy T. Tikson (2005), *Dalam Konteks Pembangunan Sebagai Transformasi ekonomi*, (Online), ([http://Ilearn. Unand ac. Id](http://Ilearn.Unand.ac.Id)).
- Hoogerwerf, A., 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan Perencanaan, Pemograman Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Dan Daerah*, Ranjawali Jakarta.
- Islamy, Irfan 1984. *Prinsip-prinsip Pembuatan Kebijakan Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- Karim Abdul Gaffar, 2003, *Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Cetakan II Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koswra, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta : Yayasan Pariba.
- Marilee S. Grindle. 2007. *Going local-Decetralization, And The Promise of Good Governance*. Princeton and Oxford : Priencenton University.
- Nawawi, H. 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, UGM Press, Yokyakarta.
- Ndraha, Thaliziduhu, *Metedelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipt, 2003.
- Purwadarmenta, W.J.S. 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pratikno, Riyono, *Komunikasi dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1979.
- Purwadarmenta, W.J.S. 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2005, “Metode Penelitian Kualitatif,” Alfabeta, Bandung
- Sutoro Eko, (2003) *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sugiyono. (2008), *Metode penelitian Kuantitatif, Kuailitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, cetakan pertama, 1984, *Desa*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, 2007 *Prospek Pembangunan Desa*, CV. Fokumedia Bandung.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta; Bandung.
- Soekanto Suryono, 1997, *Manejemen Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- S.P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, CV . Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Sumber : <http://azhariah-rachman.blogspot.com/2011/01/analisis-dan-interpretasi-data.html>

Todaro, 1997, *Perencanaan Pembangunan Sosial*, STKS, Bandung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Manajemen Pembangunan*, Haji, Masagung, Jakarta, 1991.

Widjaja, HAW., Prof. Drs., 2003, *Pemerintahan Desa/ Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003, *Sosiologi Pedesaan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Sumber-sumber Lain :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang system perencanaan pembangunan nasional

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

Prodeksel. Pmd. Kemendagri. go.id